

BAB VI

KESIMPULAN

Sejak berakhirnya Cold War, isu-isu pada ranah hubungan internasional telah mengalami pergeseran paradigma dimana isu-isu sosial, ekonomi serta lingkungan menjadi isu yang mulai dibahas dan dikaji lebih dalam untuk mewarnai diskursus hubungan internasional karena hal-hal tersebut mulai menjadi ancaman terhadap kedaulatan suatu negara. Dengan demikian, semula isu hubungan internasional yang hanya berputar di militer mulai berganti dengan isu-isu non militer. Salah satu isu yang menjadi non-traditional issue dalam ranah hubungan internasional khususnya dalam kategori keamanan lingkungan adalah keamanan sumber daya alam. Benua Asia merupakan salah satu benua terbesar di dunia yang mana menjadi rumah bagi sungai-sungai terbesar serta terkuat di dunia. Sungai Mekong sendiri merupakan sungai terpanjang di dunia yang menempati urutan ke 12 serta sungai terpanjang di Asia ke 7. Ditinjau dari segi geologis, Sungai Mekong mempunyai struktur sungai yang cukup unik dan tidak biasa jika dibandingkan dengan sungai lainnya. Di sepanjang sungai Mekong juga dijadikan sebagai jalur perdagangan, mengingat banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang berjualan di pasar terapung di sepanjang sungai Mekong.

Sifat lintas batas Sungai Mekong menambah lapisan kompleksitas baru pada konflik-konflik yang tengah terjadi. Sungai dan sumber daya airnya secara langsung mendukung lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan berperan signifikan dalam perekonomian nasional negara-negara yang dilaluinya. Hal tersebut tentunya berkaitan erat dengan lahirnya konflik terkait hegemoni sumber daya serta tantangan pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Namun, persaingan antara berbagai sektor ekonomi untuk mendapatkan akses air sungai Mekong menjadi semakin ketat dan mengakibatkan munculnya ketegangan yang berujung konflik terhadap alokasi air sungai. Konflik Sungai Mekong bukan hanya tentang air atau sumber daya, tetapi mencerminkan dinamika geopolitik yang lebih luas di Asia Tenggara. Pembangunan proyek-proyek sungai berskala besar, seperti bendungan dan irigasi, cenderung memiliki dampak yang besar bagi kelangsungan hidup dan mata pencaharian masyarakat miskin dan terpinggirkan yang sangat bergantung pada sumber daya alam di sekitar sungai. Teori Hettne tentang identitas regional menyoroti bagaimana kepentingan bersama dapat memotivasi tindakan

negara-negara yang memiliki kesamaan dalam hal sumber daya dan tantangan. Di Mekong, identitas regional sering kali dibentuk oleh kebutuhan untuk melindungi sumber daya air dan mengatasi dampak negatif dari proyek-proyek pembangunan, seperti bendungan besar yang mempengaruhi aliran air dan ekosistem sungai.

Menggunakan teori Marxisme untuk menganalisis peran negara-negara di sekitar Sungai Mekong dalam menangani krisis lingkungan memberikan wawasan tentang bagaimana kapitalisme, konflik kelas, dan ketidakadilan sosial mempengaruhi pengelolaan sumber daya dan respons terhadap krisis lingkungan. Dengan menggabungkan perspektif Marxisme, kita dapat memahami bagaimana ketimpangan ekonomi dan kekuasaan politik mempengaruhi keputusan mengenai pengelolaan sumber daya dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat di kawasan Mekong. David Harvey memberikan pandangan yang mendalam tentang Marxisme dengan fokus pada kapitalisme sebagai sistem akumulasi, ketidaksetaraan sosial, krisis lingkungan, dan konsep hegemoni. Melalui karyanya, Harvey mengaitkan pemikiran Marxis dengan analisis kapitalisme kontemporer dan menawarkan perspektif kritis terhadap dampak sistem ekonomi ini pada lingkungan dan struktur sosial. Menurut teori Marxis, sistem kapitalis mengutamakan keuntungan di atas kelestarian lingkungan. Dalam sistem kapitalis, pengejaran pertumbuhan ekonomi memprioritaskan penggunaan sumber daya alam, polusi, dan degradasi lingkungan. Pembangunan pembangkit listrik tenaga air, industrialisasi, dan pertanian intensif di cekungan Mekong sering kali didorong oleh kepentingan ekonomi kapitalis, yang menyebabkan degradasi lingkungan.

Mekong telah menjadi elemen penting dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat di seluruh lembah dan negara-negara yang dilaluinya. Namun, dengan karakteristik sungai internasional, Sungai Mekong merupakan sumber daya transnasional yang dimiliki, dikelola, dan dieksploitasi oleh enam negara. Tantangan-tantangan ini datang dari berbagai penyebab yang berbeda, termasuk penyebab subyektif dan obyektif. Meskipun berbagi fitur geografis yang sama di Sungai Mekong, setiap negara tepi sungai memiliki manfaat dan prioritasnya masing-masing. Negara-negara secara bersamaan mengembangkan pembangkit listrik tenaga air untuk memenuhi permintaan energi yang terus meningkat, melayani pembangunan ekonomi, membentuk perlombaan pembangkit

listrik tenaga air di sub kawasan. Sebagaimana yang kita ketahui, Pembangunan PLTA tentunya akan menggusur ratusan ribu orang. Untuk wilayah hilir, saat ini ada banyak proyek yang sedang dilaksanakan.

Dalam beberapa dekade terakhir, lembah sungai Mekong memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan peningkatan permintaan listrik. PLTA telah lama dianggap sebagai sumber energi yang berkelanjutan karena terbarukan dan tidak mengeluarkan gas rumah kaca selama proses produksi. Hal tersebut menjadikan lembah Sungai Mekong menjadi contoh nyata dari tantangan tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Daerah aliran sungai Mekong, yang merupakan sumber daya vital bagi jutaan orang di Asia Tenggara, menghadapi berbagai masalah lingkungan yang berasal dari pendekatan pembangunan yang terfragmentasi. Pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air, yang merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi, mengganggu pola aliran alami dan merusak populasi ikan, sehingga berdampak pada ketahanan pangan dan mata pencaharian. Demikian pula, deforestasi untuk pertanian meningkatkan erosi tanah dan menurunkan kualitas air, yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas pertanian dalam jangka panjang di Kawasan sungai Mekong. Hadirnya Mekong River Commission (MRC) yang bertujuan untuk untuk mengkoordinasikan pengelolaan dan pembangunan sungai Mekong secara berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi ternyata kegiatan mekanismenya tidak terlalu efektif. Hal tersebut karena MRC bukan organisasi pengambil keputusan, dan tidak ada kekuatan penegakan hukum, peraturan yang dibuat MRC tidak mengikat MRC dibuat tidak mengikat negara-negara anggota. The Greater Mekong Subregion yang merupakan program kerja sama yang meliputi Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, Myanmar, dan Tiongkok juga tidak memiliki banyak kegiatan yang secara langsung terkait dengan memastikan keamanan air. Meskipun GMS sendiri mencakup enam negara dengan tujuan membangun kepercayaan dan mempromosikan kerjasama regional.

Meskipun keenam negara tersebut memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda, akan tetapi Kepentingan transnasional keenam negara tersebut sejalan dan melahirkan interaksi transnasional. Namun, seiring dengan pertumbuhan populasi dan

pembangunan ekonomi, tekanan terhadap sumber daya sungai Mekong semakin meningkat. dan perlindungan lingkungan untuk mencegah dan mengubah potensi konflik menjadi kerja sama yang saling menguntungkan dan pembangunan berkelanjutan di wilayah sungai di antara negara-negara anggota. Hal ini menimbulkan ketidakefisienan dan konflik kepentingan, karena aktivitas di satu negara dapat berdampak pada negara lain yang berbatasan dengan sungai yang sama. Hal tersebut jika dilihat dari kacamata teori regionalisme baru oleh Bjorn Hette yang digunakan dalam penelitian ini, di mana kesatuan geografis berkembang atas dasar kepentingan Bersama menjadikan keenam negara di sekitar Kawasan Mekong memiliki kepentingan transnasional yang sama. Teori regionalisme baru yang dikembangkan oleh Björn Hettne sangat relevan dengan situasi Sungai Mekong, di mana Hettne menekankan bahwa kesatuan geografis berkembang atas dasar kepentingan bersama. Dalam konteks Mekong, enam negara (Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam) berbagi kawasan geografis yang sama dan, karenanya, memiliki kepentingan bersama dalam pengelolaan sumber daya air dan lingkungan. Keenam negara tersebut memiliki kepentingan bersama dalam hal keamanan air, Pembangunan ekonomi, Perlindungan lingkungan, hingga Mitigasi bencana. Negara-negara sekitar kawasan Mekong juga berbagi kepentingan transnasional dalam Pengelolaan sumber daya air lintas batas, perikanan, navigasi sungai, serta mitigasi perubahan iklim. Interaksi transnasional negara-negara kawasan sungai Mekong melalui Komisi Sungai Mekong, Kerjasama Lancang-Mekong, Proyek infrastruktur lintas batas dan Pertukaran data dan informasi juga menjadikan kepentingan antar negara di kawasan sungai Mekong sangat berkaitan erat satu sama lain. Teori Regionalisme Baru Bjorn Hettne memberikan kerangka yang berguna untuk memahami dinamika politik dan ekonomi di kawasan Sungai Mekong. Integrasi regional, identitas bersama, kekuatan kelembagaan, dan dinamika kekuasaan semuanya berperan dalam membentuk cara negara-negara di kawasan ini berinteraksi dan mengelola sumber daya bersama. Upaya kerjasama seperti yang dipimpin oleh Mekong River Commission adalah contoh konkret dari bagaimana teori ini diterapkan dalam praktik, meskipun tantangan tetap ada dalam mencapai penyelesaian yang memuaskan untuk semua pihak yang terlibat.